LKjIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

TAHUN 2021

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BANYUMAS

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(L K j I P)
TAHUN 2021

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN BANYUMAS
2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala limpahan karunia dan rahmat-Nya, serta keinginan untuk mewujudkan pertanggungjawaban pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, hingga kami dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2021.

Dalam rangka pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga dapat terwujud *good governance* yang diharapkan. Untuk itu pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang telah ditetapkan sebelumnya.

Sehubungan dengan hal itu, maka dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021.

LKjIP ini tersusun berkat kerja keras dari semua pihak yang terlibat dalam pengumpulan data dan informasi di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas. Namun kami menyadari akan adanya segala kekurangan dalam menyusun LKjIP ini, oleh karena itu kami mengharapkan kritik dan saran yang bermanfaat guna peningkatan kualitas yang lebih baik pada penyusunan yang akan datang. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Kabupaten Banyumas Tahun 2021 ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya.

Purwokerto, Januari 2022

Plt. Kepala Dinperindag Kabupaten Banyumas
Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Drs. PURWADI SANTOSO, M.Hum.
Pembina Utama Muda
NIP. 19630629 198903 1 003

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL..... i
KATA PENGANTAR..... ii
DAFTAR ISI..... iv
IKHTISAR EKSEKUTIF..... v
BAB I PENDAHULUAN..... 1
A. Latar Belakang..... 1
B. Landasan Hukum..... 2
C. Tujuan..... 2
D. Kedudukan,Tugas Pokok dan Fungsi SKPD serta Struktur Organisasi..... 3
E. Kondisi Kepegawaian dan Sarana Prasarana..... 6
F. Permasalahan dan Isu-isu Strategis..... 8
BAB II PERENCANAAN KINERJA..... 10
A. Rencana Strategis..... 10
1. Visi dan Misi..... 10
2. Tujuan..... 11
3. Sasaran..... 11
B. Indikator Kinerja Utama..... 11
C. Perjanjian Kinerja..... 12
D. Rencana Anggaran Tahun 2021..... 13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA..... 14
A. Capaian Kinerja Organisasi..... 16
B. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran Strategis..... 17
C. Akuntabilitas Keuangan…… 31
D. Analisa Efisiensi..... 32
E. Penghargaan..... 33
BAB IV PENUTUP..... 34
LAMPIRAN :
1. Perjanjian Kinerja Tahun 2021
2. Dokumentasi Penghargaan Tahun 2021
3. Pengukuran Kinerja Tahun 2021

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kinerja Tahunan yang dtetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2021. Penyusunan LKjIP Tahun 2021 pada hakekatnya adalah upaya untuk memberikan penjelasan akuntabilitas kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2021.

Visi penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas mengacu Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, yaitu “Menjadikan Banyumas yang Maju, Adil Makmur dan Mandiri”, dalam mendukung visi tersebut, dijabarkan menjadi 8 (delapan) misi atau yang dikenal Hasta Krida, yaitu:

1. Mewujudkan Banyumas sebagai Barometer Pelayanan Publik.
2. Meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan.
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan.
4. Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor Kedaulatan Pangan.
5. Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan.
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan industri kerakyatan, Pariwisata, dan Industri Kreatif berbasis sumber daya local.
8. Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religius.

Keterkaitan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas dengan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih terfokus pada misi ke-3 yaitu “Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan” dengan tujuan “Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan meningkatkan peran sektor pertanian dan non pertanian” pada sasaran “Meningkatnya pertumbuhan industri pengolahan, perdagangan dan jasa”.

Agar visi dan misi tersebut lebih mudah diimplementasikan maka dirumuskan tujuan dan sasaran yang akan diwujudkan melalui pelaksanaan program dan kegiatan. Keberhasilan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas dalam mencapai tujuan dan sasaran diukur melalui capaian indikator kinerja.

Capaian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas tahun 2021 direprentasikan oleh capaian indikator kinerja sebagai berikut:

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perindustrian	Persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	24,32%	25,37%
2	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perdagangan	Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	15,23%	15,23%

* = Data dari BPS tahun 2020, data tahun 2021 belum dirilis

Dengan capaian kinerja rata-rata di atas target yang telah ditentukan, maka capaian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas Tahun 2021 masuk dalam kategori baik. Melalui LKjIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas tahun 2021 ini, diharapkan bisa menjadi bahan perbaikan bagi pelaksanaan kebijakan dan program Pemerintah Kabupaten Banyumas tahun 2021 mendatang sesuai dengan rencana dan sasaran strategis daerah.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas lahir pada tanggal 6 September 2016 didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas, sedangkan tugas dan fungsinya tertuang dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2018. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas dituntut untuk melaksanakannya dengan transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2021 dalam rangka melaksanakan visi dan misi Bupati Banyumas sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas, serta sebagai

salah satu alat untuk mendapatkan masukan bagi stakeholder demi perbaikan kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas, selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, penyusunan Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja.

B. Landasan Hukum

Dasar hukum yang melandasi disusunnya Laporan Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas Tahun 2021 antara lain:

a. Peraturan Pemerintah Nomor: 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
b. Peraturan Pemerintah Nomor: 39 Tahun 2006 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
c. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
e. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja.

C. Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja ini adalah untuk memberikan gambaran yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan tentang

kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas selama Tahun 2021.

Hasilnya diharapkan dapat membantu pimpinan dan seluruh jajaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas dalam mencermati berbagai permasalahan sebagai bahan acuan dalam menyusun program di tahun berikutnya. Dengan demikian program di tahun mendatang dapat disusun lebih fokus, efektif, efisien, terukur, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

D. Kedudukan, Tugas dan Fungsi SKPD serta Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2018, maka Tugas dan Fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Tugas

   Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang perdagangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

2. Fungsi

   Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas dalam melaksanakan tugas tersebut menyelenggarakan fungsi :

   a. Perumusan kebijakan kesekretariatan, bidang Perindustrian, bidang Perdagangan, bidang Pasar dan bidang Metrologi;
   b. Pelaksanaan koordinasi kebijakan kesekretariatan bidang Perindustrian, bidang Perdagangan, bidang Pasar dan bidang Metrologi;
   c. Pelaksanaan kebijakan kesekretariatan, bidang Perindustrian, bidang Perdagangan, bidang Pasar dan bidang Metrologi;
   d. Pembinaan dan fasilitasi kebijakan kesekretariatan, bidang Perindustrian, bidang Perdagangan, bidang Pasar dan bidang Metrologi;
   e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kesekretariatan, bidang Perindustrian, bidang Perdagangan, bidang Pasar dan bidang Metrologi;

f. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan, bidang Perindustrian, bidang Perdagangan, bidang Pasar dan bidang Metrologi;
g. Pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis; dan
h. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas terdiri dari :

a. Kepala Dinas
b. Sekretariat, terdiri dari :
    1. Sub Bagian Perencanaan;
    2. Sub Bagian Keuangan;
    3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Perindustrian, terdiri dari :
    1. Seksi Bina Usaha Industri;
    2. Seksi Fasilitasi dan Informasi Industri;
    3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Industri.
d. Bidang Perdagangan, terdiri dari :
    1. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Usaha Perdagangan;
    2. Seksi Informasi dan Promosi Dagang.
e. Bidang Pasar, terdiri dari :
    1. Seksi Sarana dan Prasarana, Keamanan, Ketertiban dan Kebersihan Pasar;
    2. Seksi Administrasi, Keuangan dan Pengembangan SDM Pasar;
    3. Seksi Pembinaan dan Pengendalian Pedagang Kaki Lima.
f. Bidang Metrologi, terdiri dari :
    1. Seksi Penyuluhan dan Pengawasan;
    2. Seksi Pelayanan Tera / Tera Ulang.
g. Unit Pelaksana Teknis, terdiri dari :
    1. UPTD Pasar Wilayah Purwokerto I;
    2. UPTD Pasar Wilayah Purwokerto II;
    3. UPTD Pasar Wilayah Banyumas Timur;
    4. UPTD Pasar Wilayah Banyumas Barat;
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut :

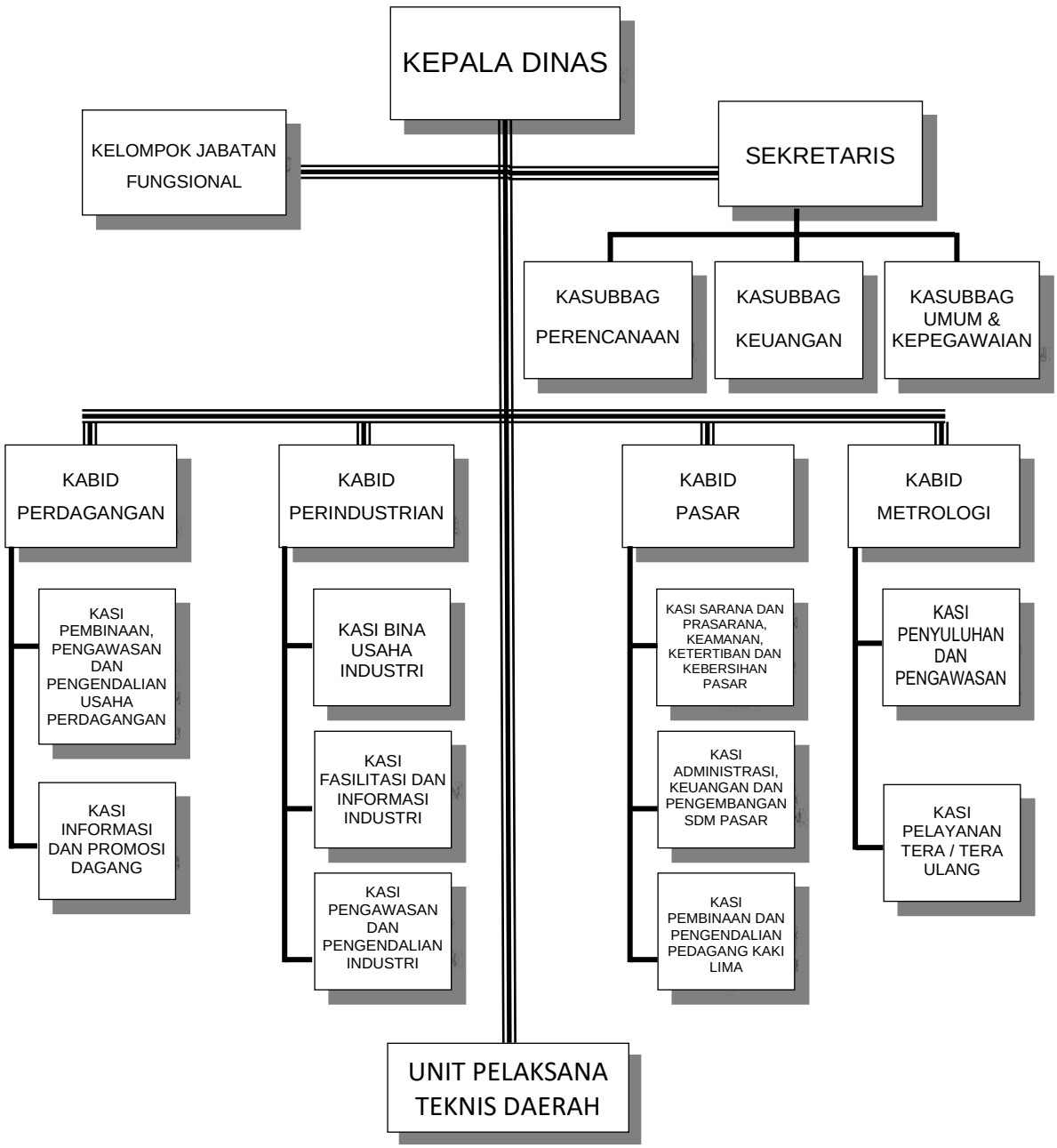

E. Kondisi Kepegawaian dan Sarana Prasarana

Dinperindag Kabupaten Banyumas pada tahun 2021 memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 436 orang yang terdiri dari 197 PNS, 1 PTT dan 238 THL. Pegawai tersebut apabila dilihat dari tingkat pendidikan adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Klasifikasi pegawai berdasarkan pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	PEGAWAI			JUMLAH
		PNS	PTT	THL	
1.	PASCA SARJANA/S2	8	-	-	**8**
2.	SARJANA/S1	32	-	30	**62**
3.	DIPLOMA III	3	-	18	**21**
4.	SLTA	75	-	137	**212**
5.	SLTP	50	-	31	**81**
6.	SD	29	1	22	**52**
J u m l a h		**197**	**1**	**238**	**436**

Data tersebut menunjukan bahwa pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas didominasi oleh pegawai dengan kualifikasi pendidikan SLTA atau 48,62%.

Tabel 2. Klasifikasi pegawai berdasarkan jenis kelamin

NO	JENIS KELAMIN	PEGAWAI			JUMLAH
		PNS	PTT	THL	
1.	Laki – laki	140	-	191	**331**
2.	Perempuan	57	1	47	**105**
J u m l a h		**197**	**1**	**238**	**436**

Tabel 3. Klasifikasi pegawai berdasarkan Golongan / Ruang

NO	BIDANG	GOLONGAN / RUANG																JML
		I				II				III				IV				
		a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	
1.	Kepala Dinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
2.	Sekretariat	-	-	1	2	1	2	2	7	1	4	-	3		1	-	-	**24**
3.	Perindustrian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	3	1	-	-	-	**9**
4.	Perdagangan	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	1	2	-	-	-	**7**
5.	Pasar	-	-	-	-	-	2	-	1	1	1	1	2	1	-	-	-	**9**
6.	Metrologi			-	3	-	2	-	3	1	1	1	9	1	-	-	-	**21**
7.	UPTD Pasar Wilayah Purwokerto II	-	-	-	7	-	5	-	4	1	1	-	2	1	-	-	-	**21**
8.	UPTD Pasar Wilayah Purwokerto I	-	-	4	7	-	4	1	6	-	-	-	2	-	-	-	-	**24**
9.	UPTD Pasar Wilayah Timur	-	-	-	5	2	10	1	6	1	1	-	1	-	-	-	-	**27**
10.	UPTD Pasar Wilayah Barat	-	-	2	15	6	13	1	16	-	-	-	2	-	-	-	-	**55**
JUMLAH		**-**	**-**	**7**	**39**	**9**	**38**	**5**	**45**	**5**	**12**	**5**	**25**	**6**	**1**	**-**	**-**	**197**

Kondisi Sarana Prasarana pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas Tahun 2021 secara umum cukup memadai. Berikut ini data sarana dan prasarana penunjang Dinperindag Kabupaten Banyumas :

Tabel 4. Data sarana penunjang operasional kantor

NO	JENIS SARANA	JUMLAH
1.	Mobil	11
2.	Sepeda Motor	29
3.	Kamera Digital	5
4.	LCD Proyektor	2
5.	Komputer	34
6.	Laptop	32
7.	Printer	34
8.	Mesin Ketik	6
9.	HTT	6

NO	JENIS SARANA	JUMLAH
10.	HP / Tablet	8

F. Permasalahan dan Isu-isu Strategis

Permasalahan pembangunan daerah merupakan gap antara kinerja pembangunan yang dicapai dengan yang direncanakan serta antara kondisi yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan. Secara garis besar permasalahan-permasalahan pembangunan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas dapat dirumuskan sebagai berikut ini:

- Nilai ekspor komoditas perdagangan belum optimal.
- Belum optimalnya kualitas pasar.
- Masih adanya lokasi PKL yang belum tertata.
- Kurangnya keterampilan dan kompetensi pelaku industri kecil dan menengah dalam hal peningkatan produktivitas industri.
- Belum optimalnya pengembangan industri kreatif.
- Perlunya meningkatkan serapan tenaga kerja lokal pada sektor industri.

Sedangkan untuk Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas daerah dan masyarakat di masa datang. Suatu kondisi menjadi isu strategis jika kondisi tersebut perlu diantisipasi agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar, atau sebaliknya akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang jika tidak dimanfaatkan, adapun isu-isu strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas sebagai berikut:

1. Pengembangan Industri yang Berdaya Saing.
   Pengembangan industri diharapkan akan mampu menjadi sumber pertumbuhan ekonomi dan penyedia lapangan kerja pada masa mendatang.
2. Pengembangan Usaha Perdagangan.
   Pengembangan usaha perdagangan merupakan suatu upaya untuk mengatasi keterbatasan pelaku usaha dalam mengakses informasi pasar, keterbatasan jangkauan pasar, keterbatasan jejaring kerja dan keterbatasan mengakses lokasi usaha yang strategis.
3. Pengembangan Pasar dan Pengendalian Pedagang Kaki Lima.

Pengembangan Pasar dan Pengendalian PKL merupakan suatu cara mengembangkan kelompok pelaku usaha dengan karakteristik berpenghasilan rendah, bergerak di sektor formal dan informal terutama disektor perdagangan di pasar dan pedagang kaki lima.

4. Penerapan Metrololgi yang Tepat.

   Penerapan metrologi yang tepat dapat memecahkan permasalahan perdagangan yang ada dan mencegah timbulnya masalah perdagangan karena hambatan teknis perdagangan.

II. PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

1. VISI DAN MISI KABUPATEN BANYUMAS

Visi Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 - 2023 adalah :

> "Menjadikan Banyumas yang Maju, Adil Makmur dan Mandiri"

Dalam mendukung visi tersebut, dijabarkan menjadi 8 (delapan) misi atau yang dikenal Hasta Krida, yaitu :

1. Mewujudkan Banyumas sebagai Barometer Pelayanan Publik.
2. Meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan.
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan.
4. Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor Kedaulatan Pangan.
5. Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan.
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan industri kerakyatan, Pariwisata, dan Industri Kreatif berbasis sumber daya lokal.
8. Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religius.

Dalam pencapaian misi Kabupaten Banyumas, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas merupakan pendukung pencapaian misi ke-3, yaitu "Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan" dengan tujuan "Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan meningkatkan peran sektor pertanian dan non pertanian" pada sasaran "Meningkatnya pertumbuhan industri pengolahan, perdagangan dan jasa".

2. TUJUAN

Dalam mewujudkan target dalam Rencana Strategis Perubahan (RENSTRA Perubahan) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2021-2023, perlu adanya tujuan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas sebagai dasar dalam ketercapaian target dimaksud. Adapun tujuan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

"Meningkatnya Pertumbuhan Industri Pengolahan, Perdagangan dan Jasa"

Tujuan tersebut memiliki 2 (dua) indikator yaitu:

1. Persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB; dan
2. Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB.

3. SASARAN

Sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perindustrian, dengan 1 (satu) indikator yaitu Persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB.
2. Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perdagangan, dengan 1 (satu) indikator yaitu Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB.

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama yang tercantum dalam Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas Nomor 050 / 2045 / 2021 Tahun 2021 tanggal 16 Agustus 2021 tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas Tahun 2021 – 2023. Adapun Indikator Kinerja Utama pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas sebagai berikut :

Tabel 5. IKU Dinperindag Kabupaten Banyumas Tahun 2021-2023.

No	Tujuan	Indikator Tujuan / Indikator Kinerja Utama (IKU)
1	Meningkatnya Pertumbuhan Industri Pengolahan, Perdagangan dan Jasa.	Persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB
		Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB

C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian kinerja merupakan tekad atau janji kinerja tahunan yang sangat penting yang perlu dilakukan pimpinan instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Perjanjian Kinerja Dinperindag Kabupaten Banyumas Tahun 2021.

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pertumbuhan Industri Pengolahan, Perdagangan dan Jasa	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perindustrian	Persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	24,32%
		Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perdagangan	Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	15,23%

D. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2021

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas pada tahun 2021 dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas (APBD) Tahun 2021 yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2020 tentang APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021, dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 97 Tahun 2020 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021, adapun untuk perubahan anggaran di tahun 2021 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021, dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021.

Jumlah Anggaran Belanja pada APBD Perubahan Tahun 2021 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas sebesar Rp. 37.149.101.013,00. Adapun komposisi belanja untuk masing-masing sasaran strategis, adalah sebagai berikut:

Tabel 7. Rencana Anggaran Per Sasaran Strategis Tahun 2021.

No	Sasaran Strategis	Rencana Anggaran
1	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perindustrian	Rp. 1.034.896.172,00
2	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perdagangan	Rp. 9.111.549.830,00
	TOTAL	**Rp. 10.146.446.002,00**

III. AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kepada pihak yang memiliki hak atau berwewenang meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Kinerja Instansi Pemerintah merupakan gambaran tentang tingkat pencapaian sasaran atau tujuan Instansi Pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi Instansi Pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang diterapkan. Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Pemerintah Kabupaten Banyumas selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyumas yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2018-2023, Renstra Perubahan 2021-2023, RKT Tahun 2021, Renja Tahun 2021, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

Setiap entitas Akuntabilitas Kinerja melakukan pengukuran kinerja dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran (target) kinerja yang dicantumkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dalam rangka pelaksanaan APBD tahun berjalan dan membandingkan realisasi kinerja program sampai dengan tahun berjalan

dengan sasaran (target) kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam RENSTRA. Setelah dilakukan pengukuran kinerja dapat diketahui selisih atau celah kinerja. Berdasarkan selisih tersebut selanjutnya dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang. Evaluasi ini dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana instansi pemerintah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)nya, serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja instansi pemerintah. Evaluasi ini diharapkan dapat mendorong instansi pemerintah untuk secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP-nya dan mewujudkan capaian kinerja (hasil) instansinya sesuai yang diamanahkan dalam Renstra.

Evaluasi dilaksanakan berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam penyusunan LKjIP ini menggunakan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Tabel 8. Skala Nilai Peringkat Kinerja.

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2.	76% ≤ 90%	Tinggi
3.	66% ≤ 75%	Sedang
4.	51% ≤ 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

Sumber: Peremendagri No 86 Tahun 2017

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dalam rangka melihat keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi perlu diketahui suatu ukuran yang merupakan suatu Indikator Kinerja Utama. Fungsi dari adanya suatu Indikator Kinerja Utama adalah untuk memperjelas apa, berapa, dan bagaimana kemajuan pelaksanaan kegiatan dan program. Dengan demikian Indikator Kinerja Utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Pemerintah Kabupaten Banyumas telah menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Nomor 050 / 1425 / 2019 Tahun 2019 tanggal 23 April 2019 yang telah diubah dalam Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas Nomor 050 / 2045 / 2021 Tahun 2021 tanggal 16 Agustus 2021 tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas Tahun 2021 – 2023. Hasil pengukuran atas indikator kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas Tahun 2020 menunjukan hasil sebagai berikut:

Tabel 9. Capaian indikator kinerja Tahun 2021 Dinperindag Kab. Banyumas

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perindustrian	Persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	24,32%	25,37%	104,32%
Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perdagangan	Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	15,23%	15,23%	100,00%

* = Data dari BPS Tahun 2020, Data Tahun 2021 belum dirilis

Rata-rata capaian indikator kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas tahun 2021 adalah sebesar 104,40% atau melebihi target (dengan penilaian kinerja sangat tinggi).

Adapun pencapaian kinerja pada setiap indikator kinerja berdasarkan kriteria penilaian realisasi kinerja dirinci dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 10. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Dinperindag Kabupaten Banyumas Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Sasaran	≤ 50% Sangat Rendah	51% ≤ 65% Rendah	66% ≤ 75% Sedang	76% ≤ 90% Tinggi	91% ≤ 100% Sangat Tinggi
1.	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perindustrian	Persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	104,32%					Sangat Tinggi
2.	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perdagangan	Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	100,00%					Sangat Tinggi

B. PENGUKURAN, EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA SASARAN STRATEGIS

Dalam laporan ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Perubahan Tahun 2021-2023 maupun Renja Tahun 2021. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran, yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pelaporan kinerja ini berdasarkan Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021, berdasarkan hal tersebut telah ditetapkan 2 (dua) sasaran dengan 2 (dua) indikator dengan rincian berikut :

Tabel 11. Nilai Peringkat Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021.

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Predikat
1.	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perindustrian	1 indikator	Sangat Tinggi
2.	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perdagangan	1 indikator	Sangat Tinggi

Secara umum Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas Tahun 2021 dan Perjanjian Kinerja 2021. Hal tersebut dapat dilihat dalam analisis capaian dari masing-masing sasaran sebagai berikut :

SASARAN 1 : Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perindustrian

Sektor Industri merupakan salah satu sektor yang berperan penting dalam pembangunan nasional. Kontribusi sektor Industri terhadap pembangunan nasional dari tahun ke tahun menunjukkan kontribusi yang signifikan. Peranan Sektor Industri dalam Pembangunan Ekonomi Nasional dapat ditelusuri dari kontribusi masing-masing subsektor terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional atau terhadap produk domestik bruto. Sektor industri mengambil bahan baku dari sektor primer dan mengubahnya menjadi produk pengguna akhir. Dalam rangka mewujudkan sasaran meningkatnya pertumbuhan sektor industri, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas sesuai dengan Perubahan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2021-2023 menetapkan 1 (satu) indikator kinerja pada sasaran ini, adapun realisasi capaian sasaran meningkatnya pertumbuhan sektor perindustrian adalah sebagai berikut:

Tabel 12. Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perindustrian

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020			Tahun 2021			Target Akhir Renstra	Capaian
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
1.	Persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	%	NA	24,66	-	24,32%	25,37%	104,32%	24,34%	104,23%

Capaian sasaran meningkatnya pertumbuhan sektor perindustrian di Tahun 2021 adalah sebesar 104,32%. Realisasi tahun 2021 mencapai 104,23% apabila dibandingkan dengan target di tahun 2023 / akhir periode Renstra,

adapun capaian dari masing-masing indikator dalam mewujudkan sasaran meningkatnya pertumbuhan sektor perindustrian adalah sebagai berikut:

1. Persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB.

Sektor industri merupakan sektor yang memberikan kontribusi yang besar terhadap PDRB, untuk sektor industri pengolahan memberikan kontribusi yang cenderung selalu naik. Perkembangan industri memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah, terutama terkait dengan penanaman modal, penggunaan bahan baku lokal, penyerapan tenaga kerja dan daya ungkit perkembangannya bagi sektor-sektor perekonomian lainnya.

Dengan semakin meningkatnya pertumbuhan industri di Kabupaten Banyumas, hal ini juga berpengaruh terhadap kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB. Persentase Kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan pada tahun 2021 mencapai 25,37% dengan target 24,32% sehinga capaiannya sebesar 104,32%, adapun perkembangan persentase kontribusi sector industri pengolahan adalah sebagai berikut:

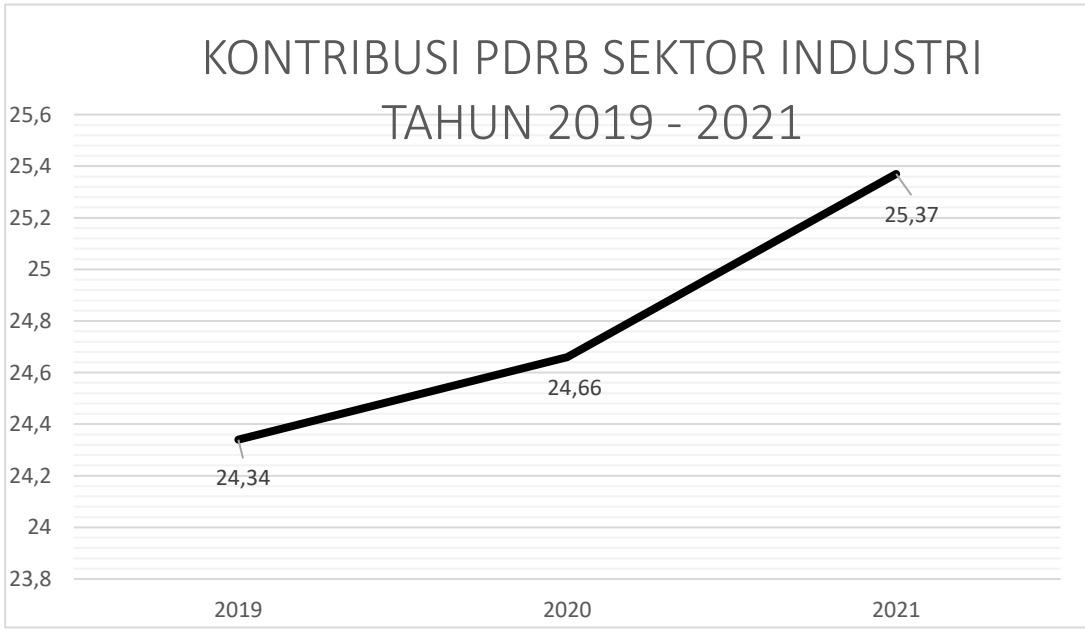

Sumber : BPS Kabupaten Banyumas

Besarnya Kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan tidak lepas dengan adanya peran industri yang ada di Kabupaten Banyumas, adapun kondisi jumlah Industri di Kabupaten Banyumas sebagai berikut:

Tabel 13. Data Pertumbuhan Industri Kabupaten Banyumas 2019 - 2021

No	Kecamatan	Industri (Unit)		
		Besar	Menengah	Kecil
(1)		(2)	(3)	(4)
1	Lumbir	-	-	2.160
2	Wangon	1	9	2.355
3	Jatilawang	-	2	911
4	Rawalo	-	1	1.239
5	Kebasen	-	5	1.473
6	Kemranjen	-	2	1.667
7	Sumpiuh	-	-	1.948
8	Tambak	-	-	1.865
9	Somagede	-	1	2.980
10	Kalibagor	-	4	844
11	Banyumas	-	2	1.711
12	Patikraja	-	2	978
13	Purwojati	-	1	2.186
14	Ajibarang	1	6	3.439
15	Gumelar	-	3	1.061
16	Pekuncen	-	1	2.650
17	Cilongok	-	8	7.673
18	Karanglewas	-	3	1.516
19	Kedungbanteng	-	2	938
20	Baturaden	1	-	507
21	Sumbang	-	1	942
22	Kembaran	1	2	835
23	Sokaraja	1	7	793
24	Purwokerto Selatan	-	5	216
25	Purwokerto Barat	1	4	407
26	Purwokerto Timur	-	4	322
27	Purwokerto Utara	-	2	374
JUMLAH		**6**	**77**	**43.990**
Tahun 2020		6	77	43.845
Tahun 2019		6	77	43.827

Dari tabel diatas diketahui bahwa jumlah industri kecil, menengah dan besar di Kabupaten Banyumas berjumlah 44.073, sedangkan untuk industri kecil dan menengah (IKM) sendiri berjumlah 44.067. Kecamatan CIlongok menjadi penyumbang industri terbesar di Kabupaten Banyumas dengan jumlah 7.681 atau 17,42% dari jumlah industri yang ada di Kabupaten Banyumas.

SASARAN 2 : Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perdagangan

Sektor Perdagangan merupakan salah satu sektor yang berperan penting dalam pembangunan nasional. Kontribusi sektor perdagangan terhadap pembangunan nasional dari tahun ke tahun menunjukan kontribusi yang signifikan. Peranan sektor perdagangan dalam pembangunan ekonomi nasional dapat ditelusuri dari kontribusi masing-masing subsektor terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional atau terhadap produk domestik bruto.

Dalam rangka mewujudkan sasaran meningkatnya pertumbuhan sektor perdagangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas menetapkan 1 (satu) indikator kinerja, adapun realisasi capaian sasaran meningkatnya pertumbuhan sektor perdagangan adalah sebagai berikut:

Tabel 14. Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perdagangan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020			Tahun 2021			Target Akhir Renstra	Capaian
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
1.	Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	NA	15,57	-	15,23	15,23	100,00	15,25	99,86%

Capaian sasaran meningkatnya pertumbuhan sektor perdagangan di tahun 2021 sebesar 100,00%. Realisasi tahun 2021 mencapai 99,80% apablia dibandingkan dengan target di tahun 2023 / akhir Renstra Perubahan, adapun capaian dari indikator dalam mewujudkan sasaran meningkatnya pertumbuhan sektor perdagangan adalah sebagai berikut:

1. <u>Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB.</u>

   Sektor perdagangan merupakan sektor yang memberikan kontribusi terhadap PDRB. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas dalam rangka meningkatkan sektor perdagangan yaitu dengan melakukan revitalisasi pasar. Perkembangan pasar tradisonal memberikan implikasi pada meningkatnya kegiatan perekonomian daerah, terutama yang digerakan oleh meningkatnya kebutuhan barang dan jasa dalam masyarakat.

   Globalisasi ekonomi juga berdampak pada masuknya investor asing maupun lokal (luar Kabupaten Banyumas), salah satu yang saat ini marak

dan tersebar di beberapa kecamatan adalah berkembangnya pasar Modern (seperti Supermarket, Minimarket) di wilayah kecamatan yang keberadaanya tidak dapat dicegah karena tuntutan globalisasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa pasar modern dewasa ini sudah menjadi tuntutan dan konsekuensi dari gaya hidup modern yang berkembang di masyarakat. Tempat-tempat tersebut menjanjikan tempat belanja yang nyaman, bersih dengan harga yang tidak kalah menariknya. Berikut merupakan data pasar modern di Kabupaten Banyumas tahun 2021:

Tabel 15. Data Pasar Modern Kabupaten Banyumas 2021

Kecamatan		Pasar Swalayan	Pusat Perbelanjaan
1.	Lumbir	-	-
2.	Wangon	5	-
3.	Jatilawang	4	-
4.	Rawalo	1	-
5.	Kebasen	1	-
6.	Kemranjen	1	-
7.	Sumpiuh	4	-
8.	Tambak	2	-
9.	Somagede	-	-
10.	Kalibagor	-	-
11.	Banyumas	4	-
12.	Patikraja	7	-
13.	Purwojati	-	-
14.	Ajibarang	4	-
15.	Gumelar	1	-
16.	Pekuncen	1	-
17.	Cilongok	2	-
18.	Karanglewas	4	-
19	Kedungbanteng	1	-
20.	Baturraden	7	-
21.	Sumbang	4	-
22.	Kembaran	8	-

Kecamatan		Pasar Swalayan	Pusat Perbelanjaan
23.	Sokaraja	9	-
24.	Purwokerto Selatan	21	1
25.	Purwokerto Barat	13	-
26.	Purwokerto Timur	16	1
27	Purwokerto Utara	12	-
TOTAL		132	2

Selain pasar modern, di Kabupaten Banyumas juga terdapat pasar tradisional, dengan adanya kegiatan revitalisasi pasar tradisional, pada tahun 2021 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas merevitalisasi sebanyak 3 pasar, yaitu Pasar Pon, Pasar Banyumas, dan Pasar Tambak, berikut ini merupakan data pasar tradisional yang dikelola Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas:

Tabel 16. Data Pasar yang dikelola Dinperindag Kab. Banyumas Th. 2021.

NO	Nama Pasar Desa , Kecamatan Alamat	Kelas Pasar	Tahun Pembangunan Pasar
1	**Pasar Wage** Jl. Brigjen Katamso No. 1 Kec. Purwokerto Timur Kel. Purwokerto Wetan Kab. Banyumas	I	2002
2	**Pasar Sarimulyo** Jl. K.H. Moh. Safei Kec. Purwokerto Timur Kel .Purwokerto Lor Kab. Banyumas	II	1987
3	**Pasar Cikebrok** Jl. Kolonel Sugiri Kec. Purwokerto Timur Kel. Kranji Kab. Banyumas	IV	1989, 2018
4	**Pasar Manis** Jl. Jend, Gatot Soebroto Kec. Purwokerto Barat Kel .Kedungwuluh Kab. Banyumas	I	2015, 2016
5	**Pasar Pon** Jl. Jend. Sudirman Barat Kec. Purwokerto Barat	II	1985, 2021

NO	Nama Pasar Desa , Kecamatan Alamat	Kelas Pasar	Tahun Pembangunan Pasar
	Kel. Bantarsoka Kab. Banyumas		
6	**Pasar Kober** Jl. Raya Kober Kec. Purwokerto Barat Kel. Kober Kab. Banyumas	IV	1991
7	**Pasar Situmpur** Jl. Pramuka Kec. Purwokerto Selatan Kel. Pwt Kulon Kab. Banyumas	III	1989
8	**Pasar Peksi Bacingah** Jl. Kongsen No, 47 Kec. Purwokerto Slatan Kel. Pwt Kulon Kab. Banyumas	II	2015, 2016
9	**Pasar Ikan Hias Mina Restu** Jl. Brigjen Encung Kec. Purwokerto Utara Kel. Purwanegara Kab. Banyumas	III	2012
10	**Pasar Larangan** Kec. Kembaran Ds. Kembaran Kab. Banyumas	II	2013
11	**Pasar Kemukusan** Jl. Wisata Baturraden Timur Kec. Sumbang Desa Ciberem Kab. Banyumas	III	1970, 2019
12	**Pasar Sokaraja** Jl. Jend, Gatot Soebroto Kec. Sokaraja Ds. Sokaraja Kidul Kab. Banyumas	I	2013, 2014, 2015, 2016, 2017
13	**Pasar Sangkalputung** Jl. Menteri Supeno No. 1 Kec. Sokaraja Ds. Sokaraja Tengah Kab. Banyumas	III	2009
14	**Pasar Banyumas** Jl, Jend, Gatot Soebroto Kec. Banyumas Ds. Sudagaran Kab. Banyumas	II	1980, 2020, 2021
15	**Pasar Buntu** Jl. Raya Buntu	III	2018

NO	Nama Pasar Desa , Kecamatan Alamat	Kelas Pasar	Tahun Pembangunan Pasar
	Kec. Kemranjen Ds. Pagelarang Kab. Banyumas		
16	**Pasar Wijahan** Jl. Raya Buntu-Kemranjen Kec. Sumpiuh Ds. Sumpiuh Kab. Banyumas	III	1985, 2018
17	**Pasar Sumpiuh** Jl. Stasiun No. 1 Kec. Sumpiuh Ds. Sumpiuh Kab. Banyumas	I	2017
18	**Pasar Tambak** Jl. Raya Tambak Kec. Tambak Ds. Kamulyan Kab. Banyumas	III	2017, 2018, 2020, 2021
19	**Pasar Pahing** Jl. Kertawibawa Kec. Karanglewas Ds. Pasir Lor Kab. Banyumas	II	2015, 2016, 2017
20	**Pasar Karangtengah** Jl. Desa Karang Tengah Kec. Cilongok Ds. Karangtengah Kab. Banyumas	IV	1987, 2018
21	**Pasar Ajibarang** Jl. Raya Pacasan Kec. Ajibarang Ds. Ajibarang Wetan Kab. Banyumas	I	1995
22	**Pasar Legok** Jl. Stasiun No. 1 Kec. Pekuncen Ds. Pekuncen Kab. Banyumas	III	2016, 2017
23	**Pasar Wangon** Jl. Raya Utara - Wangon Kec. Wangon Ds. Banteran Wetan Kab. Banyumas	I	1997, 2019, 2020
24	**Pasar Jatilawang** Jl. Raya Jatilawang	II	2015
	Kec. Jatilawang Ds. Tunjung Kab. Banyumas		

NO	Nama Pasar Desa , Kecamatan Alamat	Kelas Pasar	Tahun Pembangunan Pasar
25	**Pratistha Harsa** Jl. Jend. Soedirman No 08. Kec. Purwokerto Timur Kel. Sokanegara Kab. Banyumas	I	2012
26	**Pasar Proliman** Jl. Jend. Soedirman No 08. Kec. Purwokerto Timur Kel. Sokanegara Kab. Banyumas		2019

Dapat dijelaskan dari tabel diatas bahwa pasar yang dikelola Dinperindag Kabupaten Banyumas memiliki 7 (tujuh) kelas pasar I, 7 (tujuh) kelas pasar II, 8 (delapan) kelas pasar III dan 3 (tiga) kelas pasar IV.

Untuk Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB di tahun 2021 adalah 15,23% dengan target 15,23%, sehingga capaiannya sebesar 100,00%, Adapun perkembangan persentase kontribusi PDRB sektor perdagangan adalah sebagai berikut:

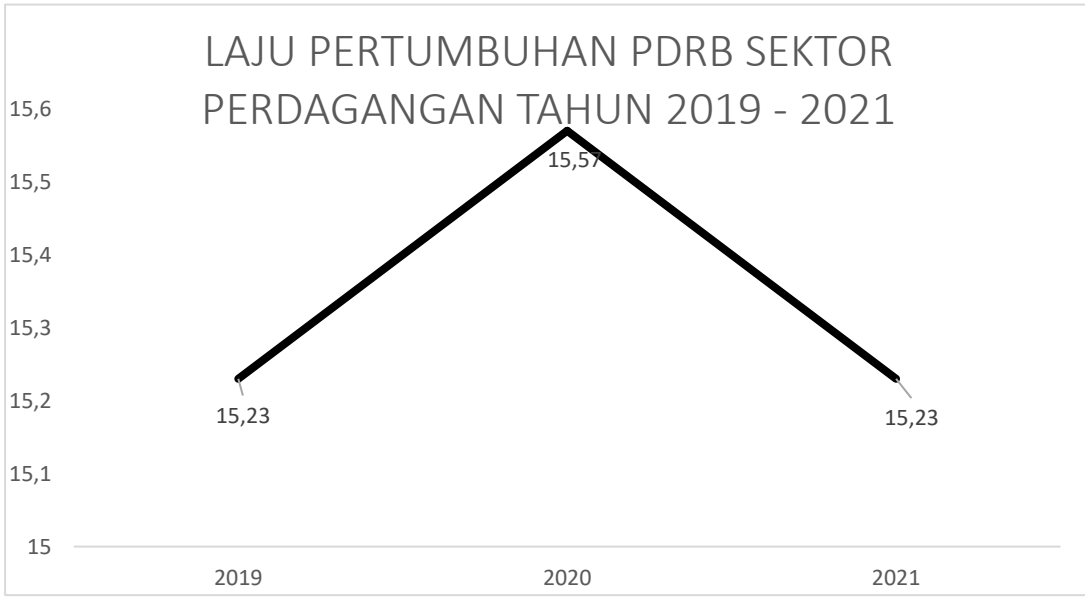

Sumber : BPS Kabupaten Banyumas

Peran ekspor di Kabupaten Banyumas juga berperan terhadap kontribusi PDRB sector perdagangan, Kabupaten Banyumas merupakan daerah agraris yang memiliki potensi disektor agro industri, salah satunya adalah industri gula kelapa. Gula kelapa sebagai produk unggulan Kabupaten Banyumas telah berperan penting dan menjadi salah satu motor penggerak perekonomian di Kabupaten Banyumas.

Gula kelapa bisa diproduksi dalam bentuk gula kelapa cetak dan gula semut/Kristal. Gula semut merupakan salah satu diversifikasi produk gula kelapa yang berbentuk serbuk. Gula semut memiliki keunggulan dibandingkan gula kelapa cetak, antara lain lebih mudah larut karena berbentuk serbuk, daya simpan yang lebih lama sekitar 1 hingga 2 tahun, kadar air berkisar 2,5 persen sampai 3 persen berat bersih, bentuknya lebih menarik, pengemasan dan pengangkutan lebih mudah, rasa dan aromanya lebih khas, harga jual yang lebih tinggi dan harganya cenderung stabil. Disamping itu, gula semut (terutama yang organik) merupakan komoditas yang banyak diminati di luar negeri sebagai produk substitusi gula pasir.

Saat ini, permintaan pasar ekspor untuk gula semut terus meningkat seiring dengan kecenderungan konsumen luar negeri untuk mengkonsumsi produk yang alami dan menyehatkan, di tahun 2021 untuk ekspor gula kelapa yang dimonitoring oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas sebanyak 12.648.600,00 kg atau 12.648,60 ton, dengan nilai sebesar $ 30.356.639,99 adapun rinciannya sebagai berikut:

Tabel 17. Data Ekspor Gula Kelapa Dinperindag Kab. Banyumas Th. 2021

NO	BULAN	VOLUME		NILAI	
1	Januari	1.037.519,40	kg	$	2.490.046,56
2	Februari	1.007.703,00	kg	$	2.418.487,20
3	Maret	1.027.126,20	kg	$	2.465.102,88
4	April	1.085.548,80	kg	$	2.605.317,12
5	Mei	973.187,40	kg	$	2.335.649,76
6	Juni	1.346.743,80	kg	$	3.232.185,12
7	Juli	822.071,40	kg	$	1.972.971,36
8	Agustus	1.132.512,00	kg	$	2.718.028,80
9	September	1.425.050,00	kg	$	3.420.120,00
10	Oktober	981.066,11	kg	$	2.354.558,66
11	November	1.120.800,78	kg	$	2.689.921,87
12	Desember	689.271,11	kg	$	1.654.250,66
TOTAL		**12.648.600,00**	**kg**	**$**	**30.356.639,99**

Kegiatan ekspor yang dilakukan ini memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap perekonomian Kabupaten Banyumas, berikut ini merupakan data ekspor yang dimonitoring oleh Dinperindag Kabupaten Banyumas:

Tabel 18. Data Ekspor Non Migas Tahun 2021 Kab. Banyumas.

NO	KOMODITAS	VOLUME	NILAI ($)	NEGARA TUJUAN
1	Kayu	41.980.096,71 kg	31.026.281,65	United Of States, Singapore, Malaysia, China
2	Rambut	6.141,00 pcs	423.166,00	Italy, Switzerlan, HK, Germany, Japan, USA, Norwegia
3	Minyak Atsiri	54.928,60 kg	2.985.765,00	United Of States, Singapore, India
4	Gula Kelapa	12.648.600,00 kg	30.356.640,00	United Of States, South Africa, Brazil, Ecuador, Portugal, Chile, Slovenia, Bulgaria
5	Jelly Grass	505.035,41 kg	970.469,97	Malaysia, Cambodia, Thailand
6	Krupuk Bawang	11.481,00 kg	16.911,51	Saudi Arabia
7	Sohun	1.543,00 kg	4.878,44	
8	Kemiri	3.958,50 kg	11.434,54	
9	Emping Melinjo	9.252,00 kg	25.322,53	Saudi Arabia
10	Mie Telor	10.402,50 kg	17.767,24	Saudi Arabia
11	Bulu Mata	3.184.169,00 pcs	3.096.881,00	India, USA, Swedia, Japan, Brazil, Australia, Polandia, Israel, UK, Germany, Romania
12	Cengkeh Kering	21.100,00 kg	88.500,00	India
13	Beras Jagung	1.470,00 kg	1.950,98	Saudi Arabia
14	Masako Chicken	480,00 kg	1.426,35	Saudi Arabia
	JUMLAH EKSPOR		**69.027.395,21**	-

Dari tabel diatas dapat diketahui realisasi nilai ekspor di tahun 2021 sebesar $ 69.027.395,21, sedangkan untuk nilai impor di tahun 2021 sebesar $ 1.183.007,14, dikarenakan perhitungan nilai ekspor bersih perdagangan adalah nilai ekspor dikurangi nilai impor, maka tahun 2021 untuk nilai ekspor bersih mencapai $ 67.844.388,07. Kayu menjadi komoditas yang paling tinggi nilai ekspornya dengan nilai mencapai $ 31.026.281,65 dengan volume 41.980.096,71 kg.

Selain ekspor, Pedagang Kaki Lima harus diakui adalah cermin dari beragamnya tingkat ekonomi masyarakat. Disatu sisi, pemerintah daerah ingin menertibkan masyarakatnya hingga slogan bersih, nyaman dan aman terpenuhi. Namun disisi lain, Pedagang Kaki Lima yang mana merupakan sektor usaha kecil ingin tetap beroperasi untuk mencari nafkah bagi masyarakat umum.

Maka demi terciptanya Pedagang Kaki Lima yang tertib dan tertata sesuai tempat yang diijinkan perlu adanya pembinaan dan penataan sesuai

dengan produk hukum yang mengatur tentang Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Banyumas, adapun produk hukum yang dimaksud adalah :

1. Perda Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
2. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2011 tentang Lokasi, Waktu, Bentuk dan Tata Cara Permohonan Surat Penempatan Pedagang Kaki Lima;
3. Keputusan Bupati Banyumas Nomor 510.17/285/2011 tentang Lokasi dan Waktu Kegiatan Pedagang Kaki Lima di Purwokerto

Di tahun 2021 pemerintah Kabupaten Banyumas lewat Dinas Perindustrian dan Perdagangan melakukan pembinaan dan penataan pedagang kaki lima sebanyak 732 PKL, adapun rincian sebagai berikut:

Tabel 19. Data PKL Dinperindag Kab. Banyumas Th. 2021 menurut kecamatan.

No	Kecamatan	Jumlah PKL keseluruhan	Jumlah PKL yang sudah dibina dari tahun 2021
1	Kecamatan Purwokerto Timur	1.631	150
2	Kecamatan Purwokerto Barat	169	100
3	Kecamatan Purwokerto Utara	205	70
4	Kecamatan Purwokerto Selatan	428	50
5	Kecamatan Baturaden	45	15
6	Kecamatan Kedungbanteng	54	25
7	Kecamatan Karanglewas	28	10
8	Kecamatan Cilongok	31	11
9	Kecamatan Ajibarang	218	20
10	Kecamatan Gumelar	15	5
11	Kecamatan Pekuncen	10	3
12	Kecamatan Jatilawang	64	14
13	Kecamatan rawalo	18	8
14	Kecamatan Purwojati	11	3
15	Kecamatan Wangon	32	3
16	Kecamatan Lumbir	61	7
17	Kecamatan Banyumas	266	50
18	Kecamatan Somagede	40	14
19	Kecamatan Kebasen	119	20
20	Kecamatan Patikraja	57	17
21	Kecamatan Sumpiuh	54	10
22	Kecamatan Tambak	61	11
23	Kecamatan Kemranjen	114	29
24	Kecamatan Sokaraja	139	30

No	Kecamatan	Jumlah PKL keseluruhan	Jumlah PKL yang sudah dibina dari tahun 2021
25	Kecamtan Kalibagor	26	12
26	Kecamatan Kembaran	65	20
27	Kecamatan Sumbang	45	25
Jumlah seluruh PKL		4.006	732

Dari tabel diatas diketahui bahwa Kecamatan Purwokerto Timur memiliki jumlah PKL terbanyak di Kabupaten Banyumas, yaitu sejumlah 1.631 PKL atau 40% dari total PKL yang ada di Kabupaten Banyumas.

Untuk urusan perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas juga melakukan penertiban untuk perlindungan konsumen melalui pelayanan tera / tera ulang, tujuan dilakukannya tera / tera ulang yaitu untuk menjamin kebenaran pengukuran pada alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, adapun kegiatan pelayanan tera/tera ulang yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas selama tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 20. Data Pelayanan Tera/Tera Ulang Tahun 2021.

No	Bulan	UTTP yang ditera / tera ulang
1	Januari	605
2	Februari	1.991
3	Maret	5.698
4	April	3.536
5	Mei	846
6	Juni	5.369
7	Juli	1.019
8	Agustus	3.996
9	September	6.304
10	Oktober	5.429
11	November	5.801
12	Desember	2.329
JUMLAH		42.923

Diketahui dari tabel diatas bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas tahun 2021 melaksanakan pelayanan tera/tera ulang kepada Pengguna, Pemilik, Pemegang alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (P3UTTP) sebanyak 42.923 alat UTTP yang ada di Kabupaten Banyumas.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Adapun pagu dan realisasi anggaran yang terkait pencapaian target sasaran dan indikator kinerja yang diperjanjikan pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 21. Anggaran dan Realisasi per Sasaran Strategis Dinperindag Kab. Bms TA 2021

No	Sasaran Strategis	Rencana (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1.	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perindustrian	1.034.896.172,00	774.810.278,00	74,87%
2.	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perdagangan	9.111.549.830,00	8.896.369.463,00	97,64%
	TOTAL	**10.146.446.002,00**	**9.671.179.741,00,00**	**95,32%**

Dari tabel diatas diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk pencapaian kinerja sasaran yang diperjanjikan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas tahun 2021.

Untuk capaian anggaran sasaran 1 yaitu Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perindustrian sebesar 74,87%, penyerapan tersebut kurang maksimal dikarenakan: 1. Adanya PMK 206/PMK.07/2020 yang membatasi penggunaan DBHCHT di Dinperindag Kab. Banyumas hanya untuk kegiatan yang terkait dengan pembangunan KIHT; 2. Kegiatan DBHCHT baru diperbolehkan untuk dilaksanakan mulai bulan Agustus 2021, sehingga waktu pelaksanaan kegiatan sangat terbatas; 3. Efisiensi anggaran.

Sedangkan capaian anggaran sasaran 2 yaitu Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perdagangan sebesar 97,64%, penyerapan anggaran tersebut sudah baik dan sisa anggaran yang ada merupakan efisiensi dari belanja yang sudah dilaksanakan.

Untuk mengetahui efektivitas anggaran terhadap capaian kinerja sasaran strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas Tahun 2021, dapat diketahui dari capaian 2 kinerja sasaran dan anggaran yang direalisasikan pada tahun 2021, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 22. Efektivitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran Dinperindag Kab. Bms. TA. 2020

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Persentase rata-rata capaian kinerja sasaran	Realisasi Anggaran	
				(Rp.)	%
1	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perindustrian	1	104,32%	774.809.778,00	74,87%
2	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perdagangan	1	100,00%	8.896.369.463,00	97,64%

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran pada tahun anggaran 2021 efektif terhadap pencapaian kinerja sasaran Pemerintah Kabupaten Banyumas.

D. ANALISA EFISIENSI

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai atau lebih dari 100%. Dari Tabel 22 dapat dilihat terdapat 2 (dua) sasaran menunjukan angka capaian kinerja sasaran diatas 100%. Keberhasilan pencapaian kinerja anggaran dengan menggunakan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 23. Tingkat Efisensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Persentase rata-rata capaian kinerja sasaran	Persentase Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perindustrian	1	104,32%	74,87%	29,45%
2	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perdagangan	1	100,00%	97,64%	2,36%

E. PENGHARGAAN

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas dalam melaksanakan amanahnya telah dilakukan secara optimal dengan mengerahkan sumber daya dan potensi yang dimiliki. Prestasi dan penghargaan yang diterima Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas di tahun 2021 adalah:

Tabel 24. Prestasi dan Penghargaan Dinperindag Kab. Banyumas 2021.

NO	PRESTASI DAN PENGHARGAAN	PENYELENGGARA	WAKTU PELAKSANAAN
1	Juara I Eksportir Tangguh kategori Usaha Kecil Menengah	Disperindag Provinsi Jateng	28 Oktober 2021
2.	Juara 1 Produk Unggulan Daerah jenis Kain Batik tingkat Provinsi Jawa Tengah	Badan Penguhubung Provinsi Jateng	23 Desember 2021

IV. PENUTUP

Secara umum, capaian indikator kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas pada tahun 2021 termasuk dalam kategori sangat tinggi dan berhasil memenuhi target yang telah ditetapkan, bahkan melebihi, hal tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 24. Capaian Indikator Kinerja Dinperindag Kab. Banyumas Tahun 2021.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perindustrian	Persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	24,32%	25,37%	104,32%
Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perdagangan	Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	15,23%	15,23%	100,00%

Namun dalam mencapai hasil tersebut masih terdapat kendala yang memerlukan upaya dan komitmen bersama untuk meningkatkan kinerja agar penetapan kinerja yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik terlebih lagi manfaat dan dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Adapun hambatan yang terdapat di dalam Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2021, antara lain sebagai berikut :

1. Adanya Pandemi COVID-19 membuat program kegiatan yang sudah direncanakan tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan, baik anggaran yang terkena refocusing untuk BTT ataupun adanya tatanan normal baru dan pembatasan kegiatan yang tidak boleh mengadakan acara dengan jumlah peserta yang banyak.
2. Adanya PMK 206/PMK.07/2020 yang membatasi penggunaan DBHCHT di Dinperindag Kab. Banyumas hanya untuk kegiatan yang terkait dengan pembangunan KIHT.

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas untuk hambatan di atas antara lain sebagai berikut :

1. Mengadakan rapat, sosialisasi atau pelatihan dengan protokol kesehatan yang ketat dan membatasi jumlah peserta dengan menerapkan 3M (Memakai masker, Mencuci tangan, dan Menjaga jarak).

2. Koordinasi lebih lanjut dengan Kementerian Perindustrian terkait penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas Tahun 2021 kami buat. Kami menyadari bahwa LKjIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas Tahun 2021 ini masih belum sempurna. Oleh karena itu kami mengharapkan masukan, saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan penyusunan LKjIP di masa yang akan datang.

LAMPIRAN LKjIP 2021

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BANYUMAS

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 102 Purwokerto 53116
Telp. (0281) 636018, 637087, 626114, Fax. (0281) 622940
Website : http://dinperindag.banyumas.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. YUNIYANTO, MM.
Jabatan : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Ir. ACHMAD HUSEIN
Jabatan : Bupati Banyumas

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwokerto, 2021

PIHAK KEDUA,	PIHAK PERTAMA,
BUPATI BANYUMAS	KEPALA DINPERINDAG KABUPATEN BANYUMAS
Ir. ACHMAD HUSEIN	**Drs.YUNIYANTO, MM.**
	NIP. 19610622 198603 1 007

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BANYUMAS

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	TARGET
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya pertumbuhan industri pengolahan, perdagangan dan jasa	Persentase Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor.	- **Formulasi :** Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor tahun n dikurangi tahun n-1 dibagi tahun n-1 dikali 100% - **Tipe Perhitungan :** Non-Kumulatif - **Sumber Data :** Buku Banyumas Dalam Angka	4,49%
		Persentase Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	- **Formulasi :** Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan tahun n dikurangi tahun n-1 dibagi tahun n-1 dikali 100% - **Tipe Perhitungan :** Non-Kumulatif - **Sumber Data :** Buku Banyumas Dalam Angka	5,83%
2.	Meningkatnya pertumbuhan sektor perdagangan	Jumlah Gula Kelapa Terekspor	- **Formulasi :** Jumlah gula kelapa terekspor tahun n - **Tipe Perhitungan :** Kumulatif - **Sumber Data :** Laporan Ekspor Bidang Perdagangan	18.000 ton
		Cakupan bina kelompok pedagang/ usaha informal	- **Formulasi :** Jumlah kelompok yang mendapatkan bantuan dan / binaan oleh pemerintah - **Tipe Perhitungan :** Kumulatif - **Sumber Data :** Laporan Kegiatan Dinperindag	54 kelompok
		Nilai Ekspor Bersih Perdagangan	- **Formulasi :** Nilai ekspor – nilai impor - **Tipe Perhitungan :** Kumulatif - **Sumber Data :** Laporan Ekspor Bidang Perdagangan	20.000.000 US $
3.	Meningkatnya pertumbuhan sektor perindustrian	Cakupan bina kelompok pengrajin	- **Formulasi :** Jumlah kelompok yang mendapat bantuan binaan dari pemerintah	67 Kelompok

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	TARGET
1	2	3	4	5
			- **Tipe Perhitungan :** Kumulatif	
			- **Sumber Data :** Laporan Kegiatan Dinperindag	
4.	Meningkatnya Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah	Persentase pertumbuhan industri kecil dan menengah	- **Formulasi :** Jumlah industri tahun n dikurangi tahun n-1 dibagi n-1 dikali 100%	1,69%
			- **Tipe Perhitungan :** Non-Kumulatif	
			- **Sumber Data :** Laporan Kegiatan Dinperindag	

NO	PROGRAM	ANGGARAN	
1.	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Rp.	100.000.000,00
2.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp.	8.699.433.230,00
3.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Rp.	70.000.000,00
4.	Program Pengembangan Ekspor	Rp.	310.000.000,00
5.	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Rp	350.000.000,00
6.	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Rp	125.000.000,00
7.	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Rp.	1.155.000.000,00
8.	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/kota	Rp.	50.000.000,00
9.	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Rp.	100.000.000,00
10.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Rp.	34.035.298.184,00
	JUMLAH	**Rp.**	**44.994.731.414,00**

Purwokerto, 2021

PIHAK KEDUA,

BUPATI BANYUMAS

Ir. ACHMAD HUSEIN

PIHAK PERTAMA,

KEPALA DINPERINDAG
KABUPATEN BANYUMAS

Drs.YUNIYANTO, MM.
NIP. 19610622 198603 1 007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. PURWADI SANTOSO, M.Hum.

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Ir. ACHMAD HUSEIN

Jabatan : Bupati Banyumas

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwokerto, Juli 2021

PIHAK KEDUA,	PIHAK PERTAMA,
BUPATI BANYUMAS	Plt. KEPALA DINPERINDAG KABUPATEN BANYUMAS ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
Ir. ACHMAD HUSEIN	**Drs. PURWADI SANTOSO, M.Hum** NIP. 19630629 198903 1 003

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BANYUMAS

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	TARGET
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya pertumbuhan industri pengolahan, perdagangan dan jasa	Persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	- **Formulasi :** PDRB sektor industri pengolahan dibagi PDRB dikali 100% - **Tipe Perhitungan :** Non-Kumulatif - **Sumber Data :** Buku Banyumas Dalam Angka	24,32%
		Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	- **Formulasi :** PDRB sektor perdagangan dibagi PDRB dikali 100% - **Tipe Perhitungan :** Non-Kumulatif - **Sumber Data :** Buku Banyumas Dalam Angka	15,23%
2.	Meningkatnya pertumbuhan perindustrian	Persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	- **Formulasi :** PDRB sektor industri pengolahan dibagi PDRB dikali 100% - **Tipe Perhitungan :** Non-Kumulatif - **Sumber Data :** Buku Banyumas Dalam Angka	24,32%
3.	Meningkatnya pertumbuhan perdagangan	Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	- **Formulasi :** PDRB sektor perdagangan dibagi PDRB dikali 100% - **Tipe Perhitungan :** Non-Kumulatif - **Sumber Data :** Buku Banyumas Dalam Angka	15,23%

NO	PROGRAM		ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Rp.	946.899.500,00	APBD, DBHCHT
2.	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/kota	Rp.	42.949.500,00	APBD
3.	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Rp.	90.000.000,00	APBD
4.	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Rp	125.000.000,00	APBD
5.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Rp.	70.000.000,00	APBD
6.	Program Pengembangan Ekspor	Rp.	150.000.000,00	APBD
7.	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Rp.	92.900.000,00	APBD
8.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp.	8.685.763.230,00	APBD, TP
9.	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Rp	350.000.000,00	APBD
10.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Rp.	31.764.773.809,00	APBD
	JUMLAH	**Rp.**	**42.318.286.039,00**	

Purwokerto, Juli 2021

PIHAK KEDUA,

BUPATI BANYUMAS

Ir. ACHMAD HUSEIN

PIHAK PERTAMA,

Plt. KEPALA DINPERINDAG
KABUPATEN BANYUMAS
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN

Drs. PURWADI SANTOSO, M.Hum
NIP. 19630629 198903 1 003

LAMPIRAN LKjIP 2021

DOKUMENTASI PENGHARGAAN TAHUN 2021

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BANYUMAS

PENGHARGAAN YANG DIPEROLEH DINPERINDAG KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2021

1. Juara I Eksportir Tangguh kategori Usaha Kecil Menengah – 28 Oktober 2021

2. Juara 1 Produk Unggulan Daerah jenis Kain Batik tingkat Provinsi Jawa Tengah – 23 Desember 2021.

LAMPIRAN LKjIP 2021

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2021

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BANYUMAS

CAPAIAN KINERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TAHUN 2021

NO	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target 2021	Realisasi				Jumlah	Persentase capaiaan
					TR I	TR II	TR III	TR IV		
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN										
1	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai Ekspor Bersih Perdagangan	USD	25.000.000	16.711.419,28	33.754.840,11	53.193.968,93	67.844.388,06	67.844.388,06	271,38
2	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan promosi dan pembinaan pelaku usaha yang dilaksanakan	Keg	3	2	5	1	0	8	266,67
3	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pameran Dagang Nasional yang diikuti	Keg	1	0	1	0	1	2	200,00
4	Pameran Dagang Lokal	Jumlah pameran dagang lokal yang diikuti / dilaksanakan	Keg	1	0	2	1	1	4	400,00
5	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah calon eksportir / importir yang terfasilitasi di Kabupaten Banyumas	pelaku usaha	30	10	28	1	3	42	140,00
6		Jumlah Gula Kelapa Terekspor	Ton	13.000	3.072,35	6.477,83	9.486,46	12.648,60	12.648,60	97,30
7	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	%	84,44	84,78	85,19	85,24	85,45	85,45	101,20
8	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan yang memiliki izin usaha	Unit	103	105	107	125	134	134	130,10
9	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah peserta sosialisasi perijinan di sektor perdagangan yang dilaksanakan	Orang	0	5	10	9	6	30	#DIV/0!
10		Jumlah Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan toko swalayan yang difasilitasi	Keg	30	5	10	9	6	30	100,00
11	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah gudang yang memiliki TDG	Unit	41	40	42	42	42	42	102,44
12	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Pelaku Usaha yang di Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	pelaku usaha	1	0	2	0	0	2	200,00
13	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Jumlah penerbitan SIUP minol gol B dan C yang difasilitasi	Berkas	1	0	1	0	0	1	100,00
14	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Jumlah usaha perdagangan minol gol B dan C yang difasilitasi	pelaku usaha	15	0	12	0	3	15	100,00
15	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase penerimaan PAD dari retribusi pelayanan pasar	%	100	23,06	46,64	69,63	97,27	97,27	97,27
16	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang dikelola dan / direvitalisasi	Keg	26	26	26	26	26	26	100,00
17	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang direvitalisasi (Bankeu Prov)	Unit	1	0	0	1	1	1	100,00
18		Jumlah sarana distribusi perdagangan yang tersedia dan terpelihara	Unit	26	26	26	26	26	26	100,00
19	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi perdagangan yang difasilitasi	Unit	26	26	26	26	26	26	100,00
20		Persentase PKL yang tertata dan terbina sesuai tempat yang diijinkan	%	49	79	81,75	83	84,05	84,05	171,53

NO	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target 2021	Realisasi				Jumlah	Persentase capaiaan
					TR I	TR II	TR III	TR IV		
21	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Cakupan bina kelompok pedagang/ usaha informal	Kelompok	54	15	20	36	97	97	179,63
22	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pedagang Kaki Lima dan Asongan yang tertata/dibina sesuai dengan tempat yang diijinkan	Orang	200	105	535	50	42	732	366,00
23	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Koefisien variasi harga barang	%	15	2,45	5,33	7,13	7,19	7,19	152,07
24	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengendalian harga dan stok kebutuhan pokok dan barang penting yang disusun	Dokumen	300	65	71	75	79	290	96,67
25	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha/distribusi barang yang dipantau	pelaku usaha	18	15	20	42	54	54	300,00
26	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah operasi pasar yang dilaksanakan	Keg	1	0	1	0	0	1	100,00
27		Jumlah kegiatan Pasar Murah yang dilaksanakan	Keg	4	1	1	1	1	4	100,00
28	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang	%	99,03	33,18	72,18	117,46	171,69	171,69	173,37
29	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah pelayanan tera / tera ulang dan Pengawasan yang dilaksanakan	Keg	27	7	16	11	19	53	196,30
30	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang	Unit	25000	8294	18045	29364	42923	42923	171,69
31	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah UTTP yang diawasi	Unit	25000	9608	23245	30358	49203	49203	196,81
32		Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	%	75	95,05	92,52	76,35	83,39	83,39	111,19
33	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase pelaku usaha yang dipromosikan	%	0,6	0,54	1,05	1,06	1,12	1,12	186,67
34	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah kegiatan Promosi Produk Dalam Negeri yang dilaksanakan	Keg	12	1	4	1	6	12	100,00
35	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha yang diikutkan dalam promosi dagang dan industri	pelaku usaha	50	2	133	3	25	163	326,00
36	X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100,00
37	X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang disusun	Dokumen	4	2	1	1	0	4	100,00
38	X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	Dokumen	3	1	1	1	0	3	100,00
39	X.XX.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Dokumen	1	1	0	0	0	1	100,00
40		Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100,00
41	X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah administrasi keuangan yang dikelola	Jenis	2	2	2	2	2	2	100,00

NO	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target 2021	Realisasi				Jumlah	Persentase capaiaan
					TR I	TR II	TR III	TR IV		
42	X.XX.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	Orang	209	211	205	203	196	196	93,78
43	X.XX.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pengelola keuangan SKPD	Orang	25	25	25	25	25	25	100,00
44		Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	%	100	100	100	100	100	100	100,00
45	X.XX.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dilaksanakan dengan baik	Bulan	12	3	3	3	3	12	100,00
46	X.XX.01.2.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jasa Jaminan Barang Milik Daerah yang terbayarkan	Kali	1	0	0	1	0	1	100,00
47	X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang tersedia	Jenis	3	0	0	2	3	3	100,00
48	X.XX.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Meubelair Kantor yang tersedia	Unit	23	0	0	0	23	23	100,00
49	X.XX.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin kantor yang tersedia	Unit	10	0	0	7	12	19	190,00
50	X.XX.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang tersedia	Unit	22	0	0	15	7	22	100,00
51	X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang / gedung milik daerah yang dilaksanakan	Jenis	5	5	5	5	5	5	100,00
52	X.XX.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Operasional SKPD yang dipelihara	Unit	40	38	38	38	38	38	95,00
53	X.XX.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebelair yang dipelihara	Unit	15	5	10	15	15	15	100,00
54	X.XX.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	42	0	15	15	42	42	100,00
55	X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Pemkab yang dipelihara	Unit	3	3	3	3	3	3	100,00
56	X.XX.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	Unit	50	0	24	44	47	47	94,00
57		Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100,00
58	X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum yang dikelola	Jenis	6	6	6	6	6	6	100,00
59	X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Tersedia	Jenis	18	5	11	16	18	18	100,00
60	X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Jenis	50	25	30	45	50	50	100,00
61	X.XX.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	Jenis	25	5	10	20	25	25	100,00
62	X.XX.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik kantor yang tersedia	Bulan	12	3	3	3	3	12	100,00
63	X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah cetakan yang tersedia	Buah	1500	0	500	400	500	1400	93,33
64		Jumlah penggandaan yang tersedia	lbr	25000	5200	10006	6000	4000	25206	100,82
65	X.XX.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi/Konsultasi dan Pertemuan Tingkat Provinsi/Pusat yang dilaksanakan	Kali	400	80	105	110	100	395	98,75

NO	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target 2021	Realisasi				Jumlah	Persentase capaiaan
					TR I	TR II	TR III	TR IV		
66	X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	Jenis	3	3	3	3	3	3	100,00
67	X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah langganan surat kabar, telepon, internet, listrik, dan air yang dikelola	Bulan	12	3	3	3	3	12	100,00
68	X.XX.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah sewa peralatan dan perlengkapan kantor yang dilaksanakan	Jenis	2	0	0	0	0	0	0,00
69	X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pegawai Non ASN	Orang	229	225	239	236	239	239	104,37
70	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembagunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	%	91	20	35	45	109,94	109,94	120,81
71	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Cakupan bina kelompok disektor perindustrian	Kelompok	25	4	3	3	15	25	100,00
72	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah industri masyarakat yang ikut pengembangan SDM industri	Unit	35	0	0	0	120	120	342,86
73		Jumlah industri masyarakat yang ikut pengembangan SDM industri (DBHCHT)	Unit	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
74	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah sarana maupun prasarana untuk klaster industri yang tersalurkan	Unit	20	0	2	0	40	42	210,00
75	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Industri Kecil dan Menengah yang dibina (DBHCHT)	Unit	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
76		Peningkatan Jumlah Industri Kecil dan Menengah	Unit	20	25	0	0	120	145	725,00
77		Penyusunan Kajian Kelayakan KIHT (DBHCHT)	Paket	1	0	0	0	1	1	100,00
78	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase data informasi industri yang tersedia	%	40	0	0	0	45	45	112,50
79	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah informasi industri yang tersedia	informasi	1	0	0	0	1	1	100,00
80	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah industri dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SiiNas) yang difasilitasi	Unit	30	11	6	17	10	44	146,67
81	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industri (IUI), Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Menengah, Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	130	125	133,33	128,57	120	120	107,69
82	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota yang difasilitasi	ijin	10	4	2	1	3	10	100,00

NO	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target 2021	Realisasi				Jumlah	Persentase capaiaan
					TR I	TR II	TR III	TR IV		
83	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Komitmen IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota yang difasilitasi	Keg	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
84	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah industri yang diawasi perizinannya	Unit	35	5	3	29	8	45	128,57
85		Jumlah laporan hasil pengawasan perizinan yang tersusun	Laporan	35	5	3	29	8	45	128,57
UPTD PASAR WILAYAH BANYUMAS BARAT										
86	X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	%	100	100	100	100	100	100	100,00
87	X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang tersedia	JENIS	2	0	0	2	2	2	100,00
88	X.XX.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin kantor yang tersedia	Unit	2	0	0	1	1	2	100,00
89	X.XX.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang tersedia	Unit	2	0	0	0	0	0	0,00
90	X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang / gedung milik daerah yang dilaksanakan	Jenis	4	1	4	4	4	4	100,00
91	X.XX.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebelair yang dipelihara	Unit	2	0	2	0	0	2	100,00
92	X.XX.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	40	10	10	15	35	35	87,50
93	X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Pemkab yang dipelihara	Unit	5	0	1	2	5	5	100,00
94	X.XX.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	Unit	8	2	3	5	7	7	87,50
95		Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100,00
96	X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum yang dikelola	Jenis	6	5	5	5	6	6	100,00
97	X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Tersedia	Jenis	13	3	13	13	13	13	100,00
98	X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Jenis	29	5	15	15	25	25	86,21
99	X.XX.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	Jenis	13	3	6	10	13	13	100,00
100	X.XX.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik kantor yang tersedia	Bulan	12	3	3	3	3	12	100,00
101	X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah cetakan yang tersedia	Buah	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
102		Jumlah penggandaan yang tersedia	lbr	20415	2000	2500	2500	10500	17500	85,72
103	X.XX.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi/Konsultasi dan Pertemuan Tingkat Provinsi/Pusat yang dilaksanakan	Kali	20	8	8	8	0	24	120,00
104	X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	Jenis	1	1	1	1	1	1	100,00

NO	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target 2021	Realisasi				Jumlah	Persentase capaiaan
					TR I	TR II	TR III	TR IV		
105	X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah langganan surat kabar, telepon, internet, listrik, dan air yang dikelola	Bulan	12	3	3	3	3	12	100,00
UPTD PASAR WILAYAH BANYUMAS TIMUR										
106	X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	%	100	100	100	100	100	100	100,00
107	X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang tersedia	Jenis	3	2	2	2	3	3	100,00
108	X.XX.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Meubelair Kantor yang tersedia	Unit	2	2	0	0	0	2	100,00
109	X.XX.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin kantor yang tersedia	Unit	2	0	1	0	2	3	150,00
110	X.XX.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang tersedia	Unit	1	0	0	1	0	1	100,00
111	X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang / gedung milik daerah yang dilaksanakan	Jenis	4	0	2	4	4	4	100,00
112	X.XX.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebelair yang dipelihara	Unit	6	0	0	6	0	6	100,00
113	X.XX.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	16	0	0	14	17	17	106,25
114	X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Pemkab yang dipelihara	Unit	7	0	0	4	7	7	100,00
115	X.XX.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	Unit	8	0	3	4	8	8	100,00
116		Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100,00
117	X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum yang dikelola	Jenis	6	5	6	6	6	6	100,00
118	X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Tersedia	Jenis	12	0	0	9	12	12	100,00
119	X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Jenis	46	10	22	40	46	46	100,00
120	X.XX.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	Jenis	26	3	6	11	26	26	100,00
121	X.XX.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik kantor yang tersedia	Bulan	12	3	3	3	3	12	100,00
122	X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah cetakan yang tersedia	Buah	14	3	3	4	4	14	100,00
123		Jumlah penggandaan yang tersedia	lbr	9000	2000	2000	3000	1900	8900	98,89
124	X.XX.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi/Konsultasi dan Pertemuan Tingkat Provinsi/Pusat yang dilaksanakan	Kali	15	0	4	8	3	15	100,00
125	X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	Jenis	1	1	1	1	1	1	100,00
126	X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah langganan surat kabar, telepon, internet, listrik, dan air yang dikelola	Bulan	12	3	3	3	3	12	100,00
UPTD PASAR WILAYAH PURWOKERTO I										
130	X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	%	100	100	100	100	100	100	100,00
131	X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang tersedia	Jenis	1	0	1	1	1	1	100,00

NO	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target 2021	Realisasi				Jumlah	Persentase capaiaan
					TR I	TR II	TR III	TR IV		
132	X.XX.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang tersedia	Jenis	1	0	1	1	2	2	200,00
133	X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang / gedung milik daerah yang dilaksanakan	Jenis	3	2	3	3	3	3	100,00
134	X.XX.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	23	2	20	20	25	25	108,70
135	X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Pemkab yang dipelihara	Unit	7	1	2	5	7	7	100,00
136	X.XX.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	Unit	8	0	3	1	8	8	100,00
137		Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100,00
138	X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum yang dikelola	Jenis	5	5	5	5	5	5	100,00
139	X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Tersedia	Jenis	22	10	20	20	22	22	100,00
140	X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Jenis	37	10	20	30	37	37	100,00
141	X.XX.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	Jenis	22	10	20	22	22	22	100,00
142	X.XX.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik kantor yang tersedia	Bulan	12	3	3	3	3	12	100,00
143	X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah cetakan yang tersedia	Buah	6	7	7	0	0	14	233,33
144		Jumlah penggandaan yang tersedia	lbr	5000	480	980	640	2917	5017	100,34
145	X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	Jenis	2	2	2	2	2	2	100,00
146	X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah langganan surat kabar, telepon, internet, listrik, dan air yang dikelola	Bulan	12	3	3	3	3	12	100,00
147	X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pegawai Non ASN	Orang	20	20	20	20	28	28	140,00
UPTD PASAR WILAYAH PURWOKERTO II										
148	X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	%	100	100	100	100	100	100	100,00
149	X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang tersedia	Jenis	2	0	0	2	2	2	100,00
150	X.XX.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin kantor yang tersedia	Unit	1	0	0	3	1	4	400,00
151	X.XX.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang tersedia	Unit	4	0	0	16	0	16	400,00
152	X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang / gedung milik daerah yang dilaksanakan	Jenis	3	3	3	3	3	3	100,00
153	X.XX.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	10	3	6	8	12	12	120,00
154	X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Pemkab yang dipelihara	Unit	7	2	4	6	7	7	100,00

NO	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target 2021	Realisasi				Jumlah	Persentase capaiaan
					TR I	TR II	TR III	TR IV		
155	X.XX.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	Unit	1	0	1	2	3	3	300,00
156		Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100,00
157	X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum yang dikelola	Jenis	6	6	6	6	6	6	100,00
158	X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Tersedia	Jenis	8	2	4	6	8	8	100,00
159	X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Jenis	37	10	20	30	37	37	100,00
160	X.XX.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	Jenis	16	4	8	12	16	16	100,00
161	X.XX.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik kantor yang tersedia	Bulan	12	3	3	3	3	12	100,00
162	X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah cetakan yang tersedia	Buah	12	3	3	3	3	12	100,00
163		Jumlah penggandaan yang tersedia	lbr	15000	6500	3000	2000	500	12000	80,00
164	X.XX.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi/Konsultasi dan Pertemuan Tingkat Provinsi/Pusat yang dilaksanakan	Kali	2	1	1	1	0	3	150,00
165	X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	Jenis	1	1	1	1	1	1	100,00
166	X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah langganan surat kabar, telepon, internet, listrik, dan air yang dikelola	Bulan	12	3	3	3	3	12	100,00

Keterangan :
- Program / indikator program
- Kegiatan / indikator kegiatan
- Sub Kegiatan / indikator sub kegiatan